

Katalog : 7203005.51

# STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2012-2016



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**

STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI BALI 2012-2016





# STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2012-2016

**ISSN** : 2477-7773

**No. Publikasi** : 51540.1709

**Katalog** : 7203005.51

**Ukuran Buku** : 21 cm x 14,8 cm

**Jumlah Halaman** : xii + 50

**Naskah** : Bidang Statistik Distribusi

**Penyunting** : Bidang Statistik Distribusi

**Disain Kover** : Bidang Statistik Distribusi

**Diterbitkan Oleh** : ©BPS Provinsi Bali

**Dicetak Oleh** : CV. Bhinneka

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.*



**Tim Penyusun**

## **Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2012-2016**

**Penanggung Jawab Umum:**

Ir. Adi Nugroho, M.M.

**Penanggung Jawab Teknis:**

I Gede Nyoman Subadri, SE.

**Koordinator:**

I Gusti Ayu Sri Hardani, SE, M.Si.

**Anggota:**

I Gede Arya Agus Yogantara, SST.

**Layout:**

I Gede Arya Agus Yogantara, SST.



<http://bali.bps.go.id>





## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi (RB), pilar kelima berupa menghasilkan pelayanan statistik yang berkualitas, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali untuk keempat kalinya menerbitkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik.

Publikasi ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota se-Bali dalam kurun waktu 2012-2016. Dilengkapi pula dengan ulasan singkat mengenai perkembangan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali selama tahun 2012-2016, publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dalam menelaah kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan dari publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di waktu yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2017  
Kepala Badan Pusat Statistik,  
Provinsi Bali

**Ir. Adi Nugroho, M.M.**





<http://bali.bps.go.id>





# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan .....	3
<b>II. METODOLOGI</b>	
2.1 Ruang Lingkup .....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	5
2.3 Konsep dan Definisi.....	5
<b>III. ULASAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2012-2016</b>	
3.1 Gambaran Umum .....	17
3.2 Pendapatan Daerah.....	21
3.3 Belanja Daerah .....	25
<b>LAMPIRAN TABEL .....</b>	<b>29</b>







<http://bali.bps.go.id>





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012-2016 (triliun Rupiah).....	17
Gambar 2. Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2016 (triliun Rupiah) .....	18
Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali, 2012-2016 (persen).....	19
Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali, 2012-2016 (persen).....	20
Gambar 5. Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012-2016 (persen).....	21
Gambar 6. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012-2016 (persen).....	22
Gambar 7. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2012-2016 (persen).....	23
Gambar 8. Rata - Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2012-2016 (persen).....	24
Gambar 9. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012-2016 (persen).....	25
Gambar 10. Rata - Rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012-2016 (persen).....	26
Gambar 11. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012-2016 (persen).....	27
Gambar 12. Rata - Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012-2016 (persen).....	28





<http://bali.bps.go.id>





## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	31
Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	32
Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	33
Tabel 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	34
Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	35
Tabel 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	36
Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	37
Tabel 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	38
Tabel 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	39
Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	40
Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	41
Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	42
Tabel 13. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	43
Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	44
Tabel 15. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	45
Tabel 16. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	46
Tabel 17. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	47
Tabel 18. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	48





Tabel 19.	Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali, 2012 – 2016 (000 Rp) .....	49
Tabel 20.	Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali, 2012 – 2016 (000 Rp)..	50

<http://bali.bps.go.id>





## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini didasari asumsi bahwa Pemerintah Daerah merupakan institusi yang paling mengerti/memahami kondisi daerahnya sendiri. Anggaran Pemerintah Daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal Pemerintah Daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas





perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilitasi yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat dilihat potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu melihat ke mana pendapatan daerah akan dibelanjakan.

Terkait fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD kiranya bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya yang kemudian kami sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio – rasio keuangan tersebut antara lain rasio ketergantungan daerah, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efektivitas keuangan daerah. Rasio – rasio keuangan tersebut kiranya bisa bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Publikasi ini disusun dengan harapan memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Disajikan pula gambaran mengenai anggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2012 – 2016 serta analisis kondisi fiskal atau keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali berdasarkan data APBD maupun realisasi APBD tahun anggaran 2012 – 2016.





## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2012 – 2016 adalah untuk memenuhi kebutuhan data keuangan (APBD dan realisasi APBD) pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2012 – 2016 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **1.3. Sistematika Penulisan**

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2012 – 2016 merupakan salah satu dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sistematika penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Metodologi, yang terdiri dari Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan Konsep/Definisi.
3. BAB III Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2012 – 2016.
4. Lampiran Tabel-tabel.







<http://bali.bps.go.id>





## II. METODOLOGI

### 2.1. Ruang Lingkup

Data yang ditampilkan dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2012 – 2016 meliputi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2012 – 2016. Kabupaten/Kota yang dicakup meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, serta Kota Denpasar. Sementara itu, data yang dicakup merupakan data anggaran/realisasi anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

### 2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan mengkompilasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kantor Bupati/Walikota di seluruh Provinsi Bali yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah masing-masing melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

### 2.3. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, sebagai berikut :

#### ❖ Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah





#### ❖ **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### ❖ **Pajak Daerah**

Pajak daerah didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

#### ❖ **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### ❖ **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.





#### ❖ **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

#### ❖ **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

#### ❖ **Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**

##### ➤ **Bagi Hasil Pajak**

Bagi hasil pajak didefinisikan sebagai bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

##### ➤ **Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.





#### ❖ **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai transfer dana dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

#### ❖ **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

#### ❖ **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain pendapatan yang sah didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

#### ❖ **Belanja Daerah**

Belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran



yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

❖ **Belanja Tak Langsung**

Belanja tak langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

❖ **Belanja Pegawai (Tak Langsung)**

Belanja pegawai (tak langsung) didefinisikan sebagai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam belanja pegawai.

❖ **Belanja Bunga**

Belanja bunga didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

❖ **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.





#### ❖ **Belanja Hibah**

Belanja hibah didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

#### ❖ **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### ❖ **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### ❖ **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.





#### ❖ **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tak terduga didefinisikan sebagai belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

#### ❖ **Belanja Langsung**

Belanja langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### ❖ **Belanja Pegawai (Langsung)**

Belanja pegawai (langsung) didefinisikan sebagai pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

#### ❖ **Belanja Modal**

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon,







bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

#### ❖ **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

#### ❖ **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya didefinisikan sebagai bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

#### ❖ **Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan dana cadangan didefinisikan sebagai Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

#### ❖ **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan didefinisikan sebagai semua penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

#### ❖ **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Penerimaan pinjaman daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.



❖ **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

❖ **Penerimaan Piutang Daerah**

Penerimaan piutang daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

❖ **Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir**

Penerimaan kembali investasi dana bergulir didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

❖ **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

❖ **Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan dana cadangan didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

❖ **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito





berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

❖ **Pembayaran Pokok Utang**

Pembayaran pokok utang didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

❖ **Pemberian Pinjaman Daerah**

Pemberian Pinjaman Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga.

❖ **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.





Selain konsep dan definisi di atas, dalam publikasi ini juga disajikan beberapa rasio yang kiranya dapat bermanfaat dalam menelaah keuangan Pemerintah Daerah. Berikut uraian dari konsep dan definisi rasio-rasio yang disajikan dalam publikasi ini, yaitu:

❖ **Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010:78), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- b. Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- c. Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- d. Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.
- e. Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- f. Sangat Baik, di atas 50 persen.

❖ **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142)

❖ **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran Munir(2004:48). Rasio efektivitas PAD





dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan).

❖ **Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio ini, yaitu untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

❖ **Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Norma penilaian menyatakan apabila hasil pengukuran lebih dari 50%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa kearah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik (Sholeh,dkk: 2011).



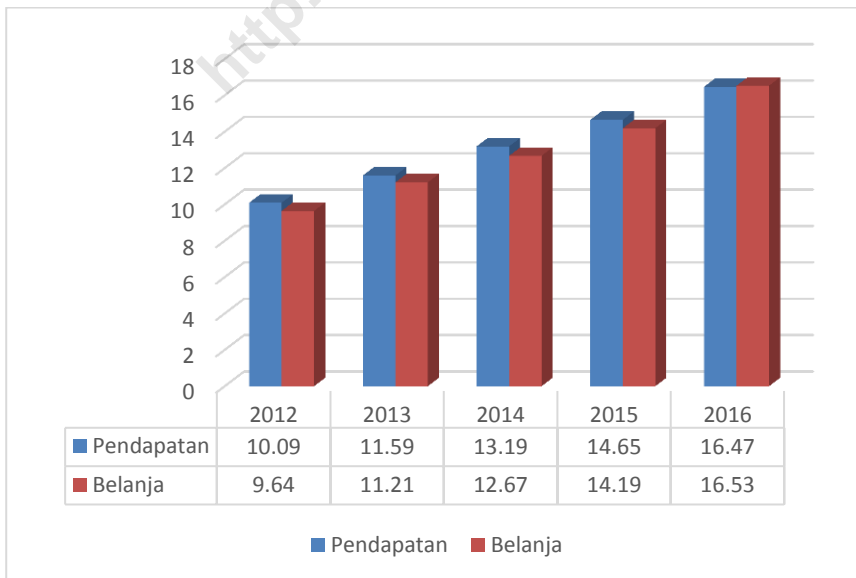


### III. Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2012 – 2016

#### 3.1 Gambaran Umum

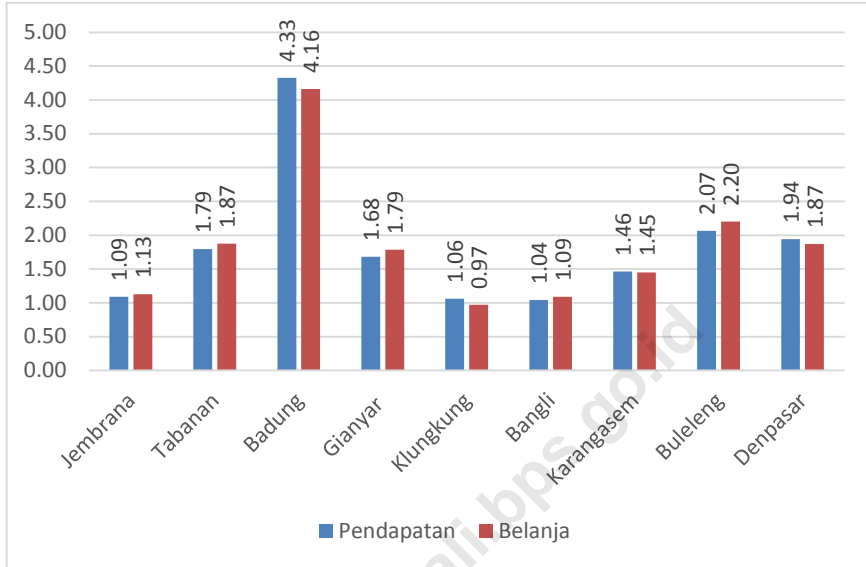
Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2012 – 2016 dari seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali terlihat adanya trend kenaikan baik dari sisi total pendapatan maupun belanja (gambar 1). Total pendapatan Pemerintah Daerah 9 kabupaten/kota se-Provinsi Bali mencapai 10,09 triliun rupiah di tahun 2012 kemudian menjadi 16,47 triliun rupiah pada tahun 2016, jika dipersentasekan pertumbuhannya mencapai 63,26 persen atau tumbuh rata – rata 15,82 persen per tahunnya. Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali juga mengalami kenaikan. Dalam rentang waktu 2012 – 2016, belanja daerah tumbuh dari 9,64 triliun pada tahun 2012 menjadi 16,53 triliun di tahun 2016, mengalami kenaikan sebesar 71,55 persen atau naik rata - rata 17,89 persen per tahun.

Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012 – 2016 (Triliun Rupiah)





Gambar 2. Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2016 (triliun rupiah)



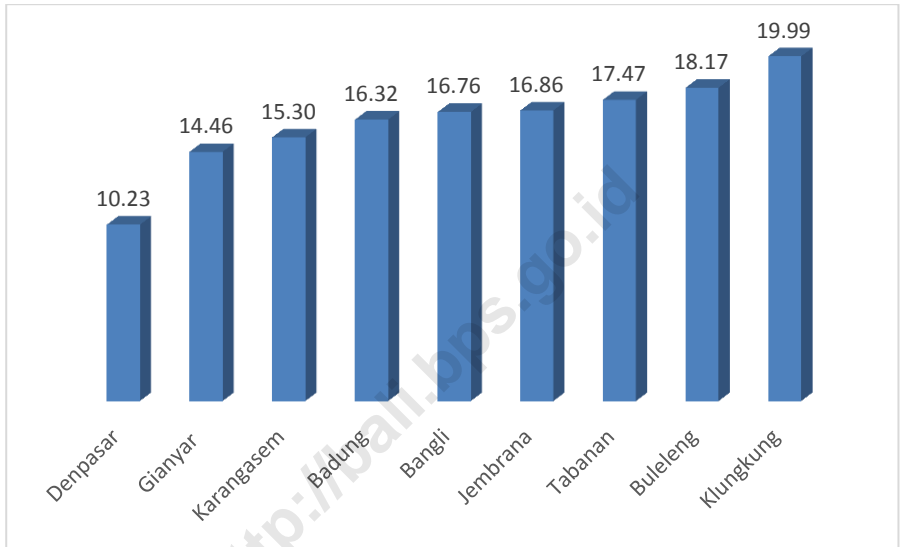
Berdasarkan realisasi pendapatan APBD di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2016 (gambar 2), menunjukkan bahwa Kabupaten Badung masih memiliki pendapatan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Badung tercatat merealisasikan penerimaan APBD pada tahun 2016 mencapai 4,33 triliun rupiah dan melakukan belanja sebesar 4,16 triliun rupiah. Selanjutnya disusul Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar yang mencapai penerimaan APBD masing-masing sebesar 2,07 triliun rupiah dan 1,94 triliun rupiah serta melakukan belanja daerah masing-masing sebesar 2,20 triliun rupiah dan 1,87 triliun rupiah. Di sisi lain, kabupaten yang tercatat memiliki capaian realisasi APBD tahun 2016 paling rendah tercatat di Kabupaten Bangli dengan nilai penerimaan APBD sebesar 1,04 triliun rupiah dan belanja daerah 1,09 triliun rupiah, disusul oleh Kabupaten Klungkung dan Jembrana dengan capaian realisasi penerimaan APBD tahun 2016 masing-masing sebesar 1,06 triliun rupiah dan 1,09 triliun rupiah serta nilai belanja daerah masing-masing sebesar 0,97 triliun rupiah dan 1,13 triliun rupiah. Pada tahun 2016, dari seluruh kabupaten/kota di Bali, tercatat 5 pemerintah kabupaten yang realisasi pengeluaran APBD-nya lebih besar





dari realisasi pendapatannya. Kekurangan ini dipenuhi melalui sisa komponen pembiayaan daerah.

*Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bali, 2012 – 2016 (persen)*



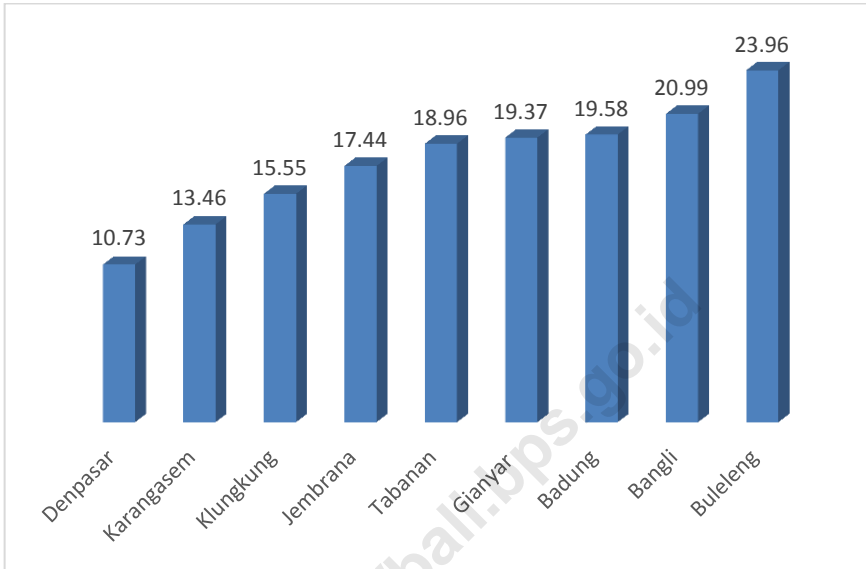
Rata-rata Pertumbuhan pendapatan daerah di 9 kabupaten/kota se- Provinsi Bali pada periode 2012 – 2016, tercatat di atas 10 persen per tahunnya untuk seluruh kabupaten/kota (Gambar 3). Pendapatan daerah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai rata – rata tertinggi di Provinsi Bali, yaitu 19,99 persen per tahun. Pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Klungkung ini, diduga akibat dari meningkatnya perkembangan pariwisata khususnya di wilayah Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Posisi berikutnya diduduki oleh Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Badung dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masing-masing sebesar 18,17 persen dan 17,47 persen. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah terendah dalam lima tahun terakhir terjadi di Kota Denpasar yaitu sebesar 10,23 persen per tahun.







Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-  
Provinsi Bali, 2012 – 2016 (persen)



Apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun dalam rentang waktu 2012- 2016 seperti tertuang dalam gambar 4, dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun yang paling tinggi tercatat di Kabupaten Buleleng dengan rata-rata belanja daerah per tahun mencapai 23,96 persen, disusul oleh Kabupaten Bangli dan Kabupaten Badung. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun yang paling rendah tercatat di Kota Denpasar mencapai 10,37 persen.

Berdasarkan Gambar 3 dan 4, terlihat bahwa beberapa wilayah memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 2012-2016 per tahunnya melebihi tingkat pertumbuhan pendapatannya, yaitu Kabupaten Buleleng, Gianyar, Bangli, Badung, Tabanan, Jembrana, dan Kota Denpasar. Sebaliknya Kabupaten Klungkung dan Karangasem tercatat memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih tinggi dari pada pertumbuhan belanja daerahnya.



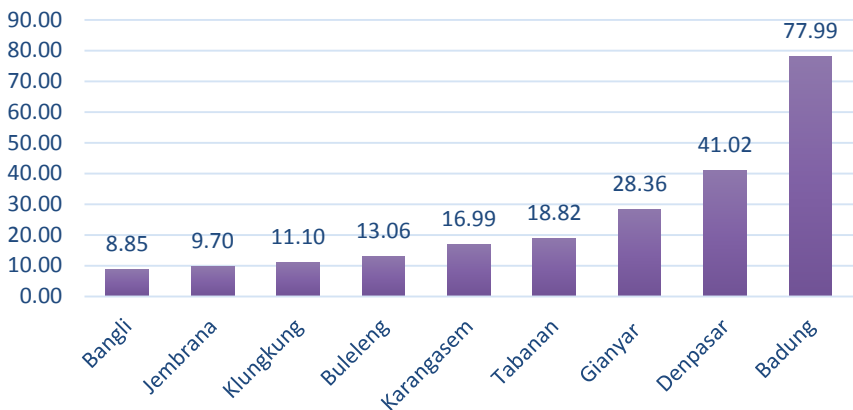


### 3.2 Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat desentralisasi fiskal, yang dalam hal ini dimaksudkan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian, mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah tersebut, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada Pemerintah Daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.

Dalam pengukuran desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui penghitungan derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Semakin besar derajat desentralisasi fiskal suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rata-rata derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012 – 2016 (persen)

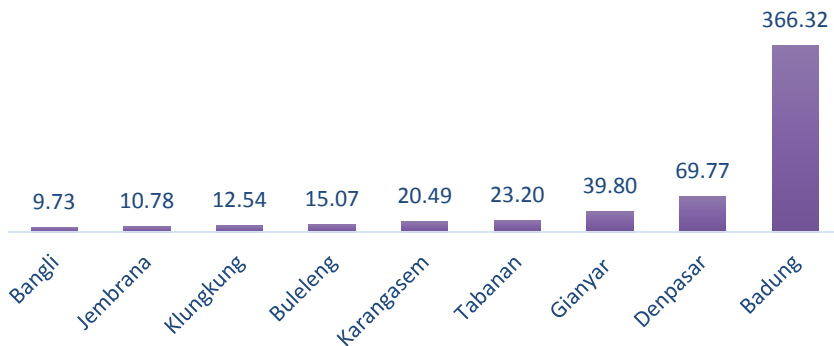




Bila dilihat rata-rata derajat desentralisasi fiskal dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tercatat Kabupaten Badung memiliki nilai tertinggi yang mencapai 77,99 persen. Sesuai hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 yang telah dijelaskan sebelumnya pada konsep dan definisi tentang pengelompokkan nilai derajat desentralisasi, terlihat bahwa Kabupaten Jembrana dan Bangli memiliki derajat desentralisasi fiskal pada kelompok sangat kurang. Selanjutnya Kabupaten Tabanan, Karangasem, Buleleng dan Klungkung tercatat memiliki derajat desentralisasi fiskal yang masih kurang. Sementara itu Kabupaten Gianyar tergolong memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sedang, serta Kota Denpasar termasuk dalam kelompok dengan derajat desentralisasi fiskal yang baik. Derajat desentralisasi fiskal yang sangat baik hanya mampu dicapai oleh Kabupaten Badung dengan capaian di atas 50 persen.

Analisis lain yang masih terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, rasio ini merupakan pembagian antara nilai PAD dengan pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan pinjaman. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Bisma, 2010:77). Dalam kurun waktu 2012-2016, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012 – 2016 (persen)

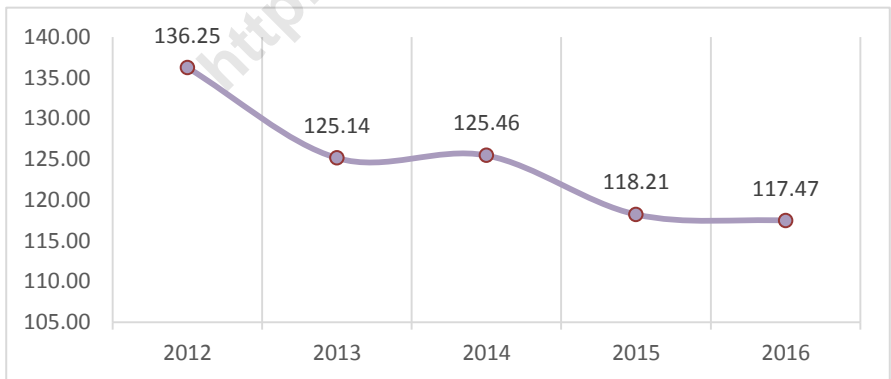




Seperti yang disajikan pada Gambar 6, Kabupaten Badung memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yang paling tinggi, yaitu sebesar 366,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki kemandirian fiskal yang paling besar dibanding kabupaten/kota lainnya, bahkan mencapai tiga kali lipat dari pendapatan diluar PAD. Sementara itu pada kurun waktu yang sama, Kabupaten Bangli tercatat memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan yang paling rendah, yaitu 9,73 persen. Hal ini kiranya menunjukkan Pemerintah Daerah Bangli masih belum bisa mandiri secara fiskal dan masih membutuhkan transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya guna pendanaan kegiatan pemerintahannya.

Mengingat peran PAD merupakan salah satu komponen dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, Pemerintah Daerah diharapkan sedapat mungkin mengelola PAD tersebut secara efektif dan efisien. Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah.

*Gambar 7. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2012 – 2016 (persen)*



Secara umum, rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2012-2016 selalu menunjukkan nilai di atas 100 yang berarti bahwa realisasi PAD selalu lebih tinggi

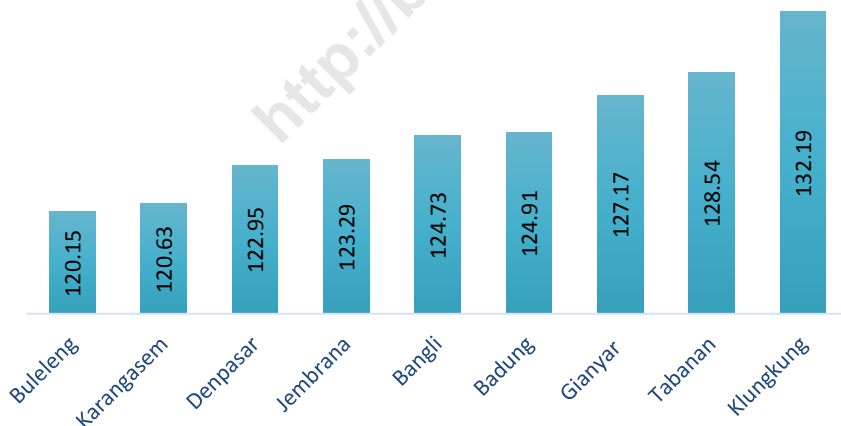




dibandingkan target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen APBD. Namun perkembangan rasio ini selama periode 2012 – 2016, menunjukkan tren penurunan, seperti terlihat pada Gambar 7, dengan rasio tertinggi tercatat pada tahun 2012 sebesar 136,25 persen dan terendah tercatat pada tahun 2016 sebesar 117,47 persen.

Bila dilihat rata – rata rasio efektivitas keuangan Pemerintah Daerah di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2012 – 2016, terlihat bahwa seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali memiliki nilai rasio di atas 100 (Gambar 8). Kabupaten Klungkung tercatat memiliki nilai rata-rata rasio tertinggi yaitu sebesar 132,19 persen. Sementara itu, rasio terendah tercatat untuk Kabupaten Buleleng yaitu sebesar 120,15 persen. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali lagi potensi riil daerahnya yang pada akhirnya mampu meningkatkan nilai PAD, sehingga nantinya dapat menjadi daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi.

*Gambar 8. Rata - Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2012 – 2016 (persen)*



### 3.3 Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal yang berlaku sampai saat ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

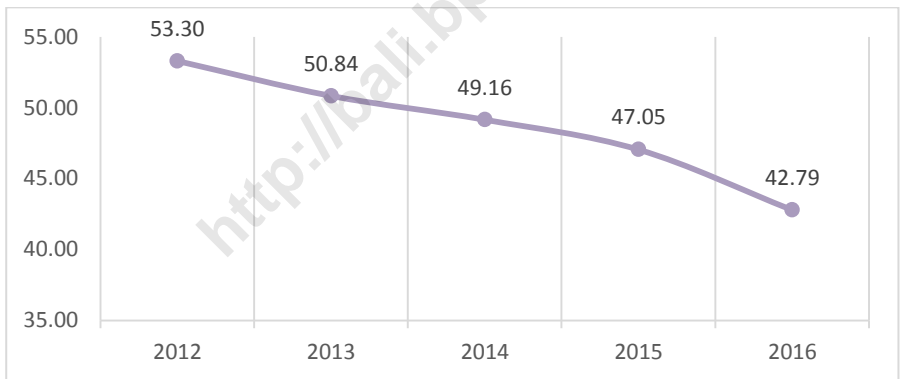




Belanja daerah di samping memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Struktur belanja suatu daerah dapat memperlihatkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2012 – 2016 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, belanja daerah masih tercatat didominasi oleh belanja pegawai. Pada rentang waktu 2012-2013, presentase belanja pegawai Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali berada di atas 50 persen. Namun mulai tahun 2014, rasio belanja pegawai sudah tercatat menurun dan berada di bawah 50 persen (Gambar 9). Tingginya rasio belanja pegawai pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota ini diduga terkait dengan tingginya jumlah pegawai negeri sipil daerah.

Gambar 9. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012 – 2016 (persen)



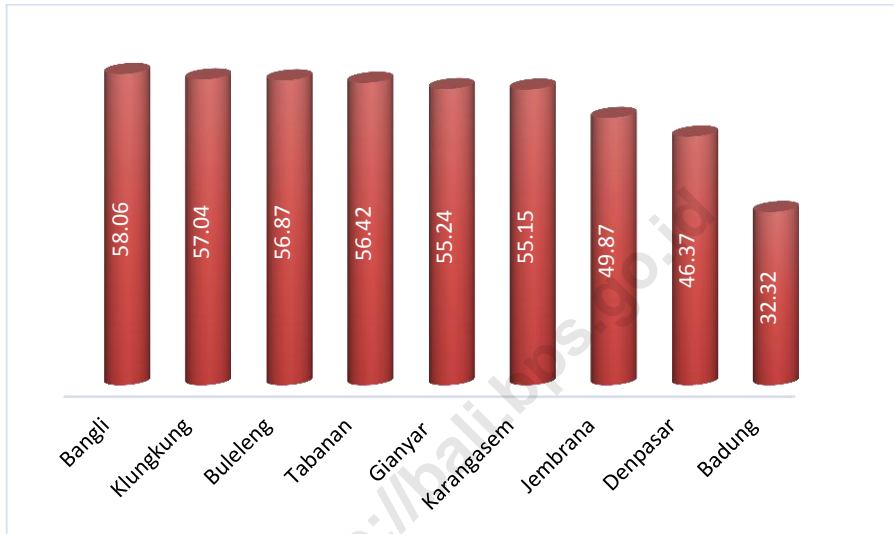
Dalam rentang waktu 2012 - 2016, dari delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali, hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Jembrana yang tercatat memiliki nilai rata – rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah di bawah 50 persen yaitu masing-masing sebesar 32,32 persen 46,37 persen dan 49,87 persen (Gambar 10). Sementara itu, kabupaten lainnya masih memiliki rasio belanja pegawai terhadap total belanja di atas 50 persen. Secara rata – rata, rasio belanja pegawai terhadap total belanja tertinggi dalam periode 2012 – 2016 tercatat di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 58,06 persen,





disusul oleh Kabupaten Klungkung dan Buleleng masing-masing sebesar 57,04 persen dan 56,87 persen.

Gambar 10. Rata - Rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012 – 2016 (persen)



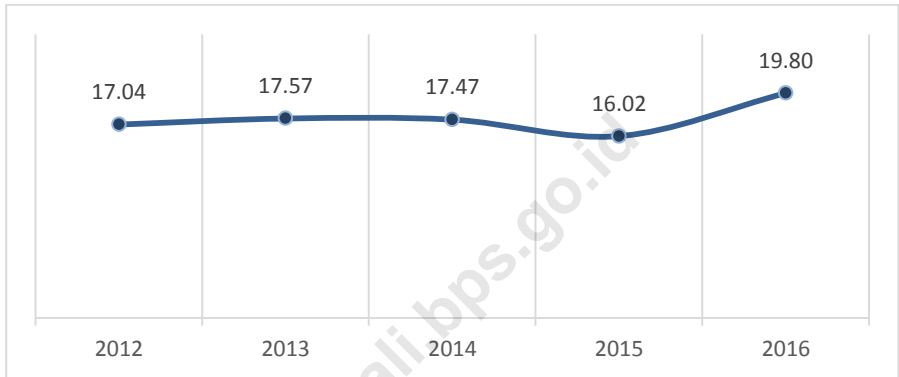
Di samping belanja pegawai, pemerintah juga melakukan belanja modal. Belanja modal Pemerintah Daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal kiranya merupakan investasi Pemerintah Daerah yang diharapkan memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satu bentuk dari belanja modal oleh Pemerintah Daerah, yaitu pembangunan infrastruktur, diharapkan akan mendorong dan meningkatkan iklim investasi di daerah bersangkutan, sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Ratio antara belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap



perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Selama periode 2012 – 2016 rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali menunjukkan trend kenaikan (Gambar 11). Namun demikian, rasio belanja modal terhadap total belanja selama 2012-2016 tercatat masih berada di bawah 20 persen.

*Gambar 11. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012 – 2016 (persen)*



Rata – rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada Gambar 12. Kabupaten Badung memiliki nilai rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah tertinggi yaitu mencapai 27,83 persen. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten Badung memungkinkan Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal lebih besar. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali selama kurun waktu 2012-2016. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, rata – rata rasio belanja modal terhadap total belanja terendah tercatat di Kabupaten Tabanan. Walaupun Tabanan termasuk daerah dengan pendapatan daerah yang cukup besar dan berada pada posisi empat besar di tahun 2016, namun dalam kurun waktu 2012-2016, rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerahnya hanya mencapai 10,96 persen, lebih kecil

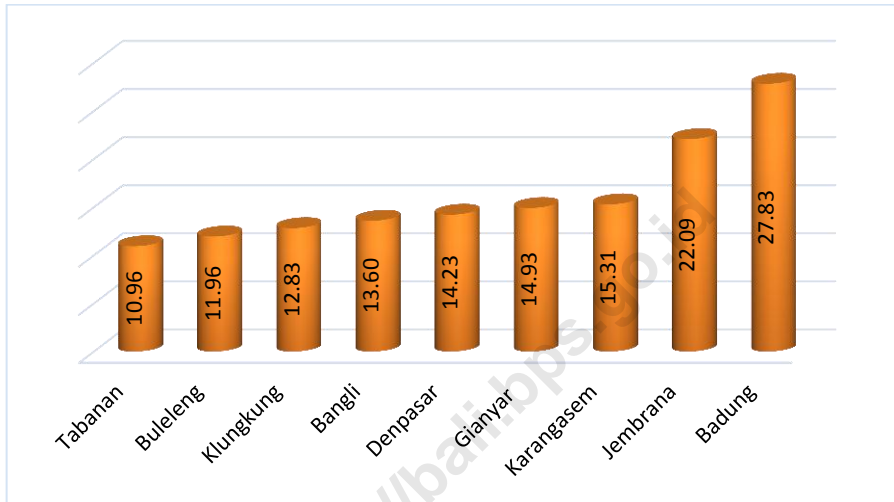






daripada Kabupaten Bangli yang notabene merupakan daerah dengan realisasi pendapatan daerah terkecil pada tahun 2016.

*Gambar 12. Rata - Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2012 – 2016 (persen)*





## LAMPIRAN TABEL

<http://bali.bps.go.id>



<http://bali.bps.go.id>





Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>608.724.425</b>	<b>693.772.159</b>	<b>766.305.431</b>	<b>836.696.489</b>	<b>1.055.603.785</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.066.992	54.775.109	65.680.235	72.832.071	88.244.045
1.1 Hasil Pajak Daerah	9.802.025	18.512.225	20.406.000	24.286.000	31.646.000
1.2 Hasil Retribusi Daerah	7.409.973	8.306.800	9.324.885	9.575.682	9.658.801
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.602.469	2.850.000	3.986.800	5.937.000	4.028.019
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.252.525	25.106.084	31.962.550	33.033.389	42.911.225
2 DANA PERIMBANGAN	457.498.291	511.597.003	550.401.204	29.732.457	716.423.706
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.565.602	15.274.007	22.029.070	20.442.465	20.748.312
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	396.762.339	450.919.726	484.825.804	486.895.030	562.525.134
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	40.170.350	45.403.270	43.546.330	63.039.590	133.150.260
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.159.142	127.400.047	150.223.992	193.487.333	250.936.034
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63.982.477	72.868.021	77.364.265	105.791.275	131.887.498
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.178.975	51.680.144	70.517.727	81.759.988	89.875.057
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.997.690	2.851.882	2.342.000	825.000	1.310.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	5.111.070	27.863.479
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>640.724.425</b>	<b>720.054.951</b>	<b>798.331.840</b>	<b>875.100.013</b>	<b>1.094.006.785</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	395.301.047	439.268.856	468.885.497	535.450.413	607.467.723
1.1 Belanja Pegawai	337.794.009	377.721.422	399.928.196	433.300.140	491.987.486
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	19.696.500	12.410.654	16.483.654	40.468.654	13.621.044
1.5 Belanja Bantuan Sosial	60.000	3.410.000	3.450.000	700.000	2.880.698
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.602.485	7.843.127	8.476.313	10.826.414	15.082.796
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	30.648.053	37.383.653	40.147.334	49.755.205	83.495.699
1.8 Belanja Tidak Terduga	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000
2 BELANJA LANGSUNG	245.423.378	280.786.095	329.446.343	339.649.600	486.539.062
2.1 Belanja Pegawai	29.465.624	35.019.951	28.276.605	33.332.647	42.042.592
2.2 Belanja Barang dan Jasa	109.892.570	119.885.953	154.026.486	156.078.816	192.015.343
2.3 Belanja Modal	106.065.184	125.880.190	147.143.252	150.238.137	252.481.128
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>32.000.000</b>	<b>26.282.791</b>	<b>32.026.409</b>	<b>4.568.122</b>	<b>38.403.000</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.097.000	35.679.791	41.494.848	48.362.528	48.385.706
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.100.000	29.482.791	36.231.954	43.099.634	42.321.143
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	62.894	0	664.563
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	62.894	0
1.8 Lainnya	5.997.000	6.197.000	5.200.000	5.200.000	5.400.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.097.000	9.397.000	9.468.439	9.959.004	9.982.706
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	3.200.000	4.268.439	4.759.004	4.582.706
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	997.000	0	0	0
2.5 Lainnya	6.097.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.400.000
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>956.531.601</b>	<b>1.110.810.797</b>	<b>1.260.942.535</b>	<b>1.405.197.386</b>	<b>1.826.470.474</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	137.107.830	182.799.113	212.931.601	243.793.958	270.777.557
1.1 Hasil Pajak Daerah	28.724.089	57.208.398	63.408.398	84.249.480	96.019.397
1.2 Hasil Retribusi Daerah	21.977.882	28.714.329	37.841.187	41.458.781	43.362.260
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.404.980	5.925.321	8.046.089	8.046.089	7.322.114
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.000.879	90.951.065	103.635.927	110.039.608	124.073.786
2 DANA PERIMBANGAN	652.220.986	730.087.497	798.650.500	107.177.945	1.184.284.312
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.508.202	18.009.432	20.514.480	23.038.891	24.580.187
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	574.346.244	663.156.595	719.621.530	722.004.642	826.283.780
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	47.366.540	48.921.470	58.514.490	59.386.100	333.420.345
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	167.202.785	197.924.187	249.360.434	356.973.795	371.408.605
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	97.676.154
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	79.592.933	90.789.282	96.342.065	132.459.065	162.078.638
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81.732.532	98.586.909	146.900.369	224.111.730	88.183.813
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.877.320	8.547.996	6.118.000	403.000	23.470.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>996.251.601</b>	<b>1.142.530.797</b>	<b>1.287.757.355</b>	<b>1.429.917.386</b>	<b>1.870.990.474</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	696.077.112	780.426.324	888.661.528	1.045.313.438	1.233.031.906
1.1 Belanja Pegawai	612.796.418	681.735.119	769.764.376	878.463.853	1.007.000.725
1.2 Belanja Bunga	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	21.250.300	24.453.000	32.355.000	41.001.813	6.684.700
1.5 Belanja Bantuan Sosial	0	6.000.000	6.000.000	9.000.000	3.300.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.327.289	6.099.798	6.689.000	8.668.700	13.938.166
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	56.880.349	59.637.765	71.117.960	107.077.858	201.021.515
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.722.756	2.400.643	2.635.192	1.001.214	986.800
2 BELANJA LANGSUNG	300.174.489	362.104.473	399.095.827	384.603.948	637.958.568
2.1 Belanja Pegawai	13.018.909	14.428.268	14.970.987	22.661.449	33.430.192
2.2 Belanja Barang dan Jasa	152.055.072	223.003.943	260.978.974	282.243.569	391.631.744
2.3 Belanja Modal	135.100.508	124.672.262	123.145.866	79.698.930	212.896.632
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>39.720.000</b>	<b>31.720.000</b>	<b>26.814.820</b>	<b>65.235.151</b>	<b>44.520.000</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	42.000.000	37.000.000	32.094.820	40.000.000	55.000.000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	42.000.000	37.000.000	32.094.820	40.000.000	55.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.280.000	5.280.000	5.280.000	15.280.000	10.480.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.200.000	5.200.000	5.200.000	14.400.000	10.200.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	80.000	80.000	80.000	880.000	80.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	200.000
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.935.433.575</b>	<b>2.494.697.356</b>	<b>2.804.744.832</b>	<b>3.251.270.645</b>	<b>3.833.480.597</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.320.910.478	1.874.766.393	2.197.959.213	2.581.898.769	2.938.005.742
1.1 Hasil Pajak Daerah	1.207.320.000	1.726.810.360	1.986.068.719	2.302.810.000	2.562.460.318
1.2 Hasil Retribusi Daerah	37.842.067	64.555.270	75.687.001	75.244.749	104.699.674
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.623.740	43.590.838	77.554.931	111.812.395	143.726.455
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	41.124.671	39.809.925	58.648.562	92.031.625	127.119.295
2 DANA PERIMBANGAN	442.315.671	404.924.830	356.523.053	55.276.625	655.497.759
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	87.409.445	31.738.647	31.156.198	62.789.526	84.552.733
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	353.067.906	372.625.383	324.815.695	286.763.106	336.243.365
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	1.838.320	560.800	551.160	0	234.701.661
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	172.207.426	215.006.133	250.262.566	319.819.244	239.977.096
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	98.259.035	106.705.857	112.889.003	164.056.474	168.881.669
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46.475.298	76.432.769	113.491.184	155.557.770	70.890.427
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.188.540	2.909.325	571.000	205.000	205.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.284.553	28.958.182	23.311.379	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>2.051.315.790</b>	<b>2.859.793.967</b>	<b>3.269.667.130</b>	<b>3.527.203.220</b>	<b>4.060.564.778</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.230.344.838	1.464.760.252	1.632.668.191	1.901.565.200	2.157.154.322
1.1 Belanja Pegawai	821.435.762	928.622.880	1.048.987.236	1.117.317.956	1.216.401.160
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	660.000	2.090.000	3.870.000	5.420.000	4.550.000
1.4 Belanja Hibah	42.922.220	63.545.583	76.624.649	183.489.696	224.855.879
1.5 Belanja Bantuan Sosial	39.863.343	55.001.742	34.150.000	34.150.000	39.450.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	133.257.151	195.922.510	241.519.389	286.013.710	338.835.264
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	189.206.362	216.577.537	224.516.917	272.173.838	330.062.018
1.8 Belanja Tidak Terduga	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	820.970.952	1.395.033.715	1.636.998.939	1.625.638.020	1.903.410.456
2.1 Belanja Pegawai	55.540.066	74.320.572	67.333.155	66.383.972	57.957.111
2.2 Belanja Barang dan Jasa	325.505.307	428.038.244	571.809.035	569.848.140	691.839.157
2.3 Belanja Modal	439.925.579	892.674.899	997.856.749	989.405.908	1.153.614.187
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>115.882.215</b>	<b>365.096.611</b>	<b>464.922.298</b>	<b>411.341</b>	<b>328.747.214</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	261.082.215	479.096.611	464.922.298	275.932.575	498.550.684
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	261.082.215	479.096.611	464.922.298	275.932.575	498.550.684
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	145.200.000	114.000.000	0	0	169.803.470
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	145.200.000	114.000.000	0	0	169.803.470
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.663.033</b>



Tabel 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>974.869.151</b>	<b>1.112.299.413</b>	<b>1.187.870.082</b>	<b>1.339.991.864</b>	<b>1.623.511.105</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	210.192.685	238.558.925	312.160.449	370.679.368	448.142.329
1.1 Hasil Pajak Daerah	143.247.723	156.458.723	211.596.789	248.254.234	310.977.532
1.2 Hasil Retribusi Daerah	27.727.106	27.546.296	30.560.391	31.668.994	35.691.785
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.339.119	5.339.119	6.616.161	9.902.111	8.717.260
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.878.737	49.214.788	63.387.108	80.854.029	92.755.752
2 DANA PERIMBANGAN	592.077.460	683.872.430	684.180.739	73.111.095	965.786.291
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.264.259	29.420.424	12.623.291	24.729.422	26.587.184
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	532.883.001	609.293.266	626.674.608	641.915.439	705.975.450
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	35.930.200	45.158.740	44.882.840	0	233.223.657
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	172.599.006	189.868.058	191.528.894	302.667.635	209.582.485
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	64.142.479	69.626.817	73.596.586	107.660.232	126.758.477
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	105.233.087	116.634.566	110.908.308	188.602.403	82.239.008
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.223.440	3.606.676	7.024.000	6.405.000	585.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.006.519.359</b>	<b>1.156.799.413</b>	<b>1.285.370.082</b>	<b>1.445.120.459</b>	<b>1.916.464.409</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	698.038.290	765.204.605	816.325.763	993.556.610	1.096.395.236
1.1 Belanja Pegawai	608.763.139	670.620.250	699.814.264	838.350.786	832.679.167
1.2 Belanja Bunga	75.050	0	0	0	5.250.000
1.3 Belanja Subsidi	2.818.320	2.872.920	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	29.363.582	25.053.300	23.881.650	22.514.710	44.029.118
1.5 Belanja Bantuan Sosial	0	8.475.000	9.989.130	5.173.630	5.185.800
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25.332.668	25.612.785	31.492.420	32.725.924	42.097.124
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	31.385.531	34.270.350	50.648.299	94.291.560	166.654.028
1.8 Belanja Tidak Terduga	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
2 BELANJA LANGSUNG	308.481.069	391.594.808	469.044.319	451.563.849	820.069.174
2.1 Belanja Pegawai	34.160.350	32.164.235	36.415.667	44.133.377	51.772.799
2.2 Belanja Barang dan Jasa	140.376.213	176.459.357	231.697.502	216.148.494	307.443.712
2.3 Belanja Modal	133.944.506	182.971.217	200.931.150	191.281.978	460.852.662
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>32.349.792</b>	<b>44.500.000</b>	<b>97.500.000</b>	<b>83.915.981</b>	<b>292.953.304</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.349.792	50.000.000	105.000.000	112.628.595	308.003.304
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.000.000	50.000.000	105.000.000	112.628.595	158.003.304
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	349.792	0	0	0	150.000.000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000	5.500.000	7.500.000	7.500.000	15.050.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	15.050.000
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000	5.500.000	7.500.000	7.500.000	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>699.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>554.900.431</b>	<b>613.644.989</b>	<b>667.389.254</b>	<b>838.871.569</b>	<b>1.067.796.991</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.603.693	48.541.694	69.749.456	89.563.450	121.979.255
1.1 Hasil Pajak Daerah	871.733	7.020.496	12.946.461	17.038.900	35.943.923
1.2 Hasil Retribusi Daerah	0	12.575.127	19.876.663	19.609.138	21.841.439
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.228.434	5.963.550	8.619.793	8.101.503	7.773.398
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.503.526	22.982.522	28.306.539	44.813.909	56.420.495
2 DANA PERIMBANGAN	440.155.874	507.661.415	531.480.691	39.436.391	714.620.572
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.720.621	19.775.716	14.785.505	18.650.569	20.406.590
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	387.340.103	444.174.019	474.427.796	484.541.151	539.855.201
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	33.095.150	43.711.680	42.267.390	54.045.790	154.358.781
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79.140.864	57.411.879	66.159.107	192.070.609	231.197.165
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	33.633.600
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	47.949.281	55.231.304	58.483.707	78.500.342	130.084.428
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	29.288.473	0	0	98.167.267	34.259.137
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.903.110	2.210.575	7.675.400	15.403.000	33.220.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>590.253.930</b>	<b>647.135.362</b>	<b>709.378.305</b>	<b>912.707.523</b>	<b>1.216.958.321</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	398.949.275	433.248.609	455.215.480	597.789.006	620.162.388
1.1 Belanja Pegawai	368.382.599	357.658.272	381.191.187	490.736.393	503.390.607
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	4.703.735	46.543.176	41.666.374	37.993.734	3.432.200
1.5 Belanja Bantuan Sosial	7.569.840	551.000	2.081.977	1.662.500	2.698.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	844.481	2.519.352	2.519.352	7.447.241	7.246.883
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	16.448.620	24.976.809	27.456.590	59.649.138	96.463.939
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000	6.930.759
2 BELANJA LANGSUNG	191.304.655	213.886.753	254.162.825	314.918.517	596.795.933
2.1 Belanja Pegawai	9.779.060	17.420.901	11.455.689	14.046.907	23.911.163
2.2 Belanja Barang dan Jasa	87.121.555	113.569.926	154.470.454	175.184.539	325.727.702
2.3 Belanja Modal	94.404.040	82.895.927	88.236.882	125.687.071	247.157.069
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>35.353.499</b>	<b>33.490.374</b>	<b>42.682.754</b>	<b>13.008.529</b>	<b>149.161.330</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	37.703.499	38.740.374	45.432.754	76.210.954	155.886.330
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37.535.374	37.535.374	44.682.754	75.835.954	154.861.330
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	168.125	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	1.205.000	750.000	375.000	1.025.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.350.000	5.250.000	2.750.000	2.375.000	6.725.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.350.000	5.250.000	2.750.000	2.375.000	6.725.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Tabel 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>567.249.437</b>	<b>653.197.481</b>	<b>721.635.214</b>	<b>826.028.973</b>	<b>1.030.680.245</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.000.000	42.000.000	55.200.000	82.000.000	92.000.000
1.1 Hasil Pajak Daerah	5.793.609	7.101.021	10.161.312	10.241.554	12.333.000
1.2 Hasil Retribusi Daerah	12.486.918	12.623.598	14.045.488	22.252.888	22.054.154
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000	2.500.000	4.400.200	3.318.478	3.115.143
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.219.473	19.775.381	26.593.000	46.187.080	54.497.703
2 DANA PERIMBANGAN	453.987.421	511.399.438	548.602.929	44.715.580	772.968.948
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.785.258	18.883.194	19.026.004	19.079.052	19.142.433
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	396.942.913	450.812.694	486.381.005	499.734.801	568.278.934
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	38.259.250	41.703.550	43.195.920	55.096.890	185.547.581
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	82.262.016	99.798.044	117.832.285	170.118.230	165.711.297
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.137.935	56.790.913	60.133.119	80.308.152	117.900.992
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	27.452.881	39.289.956	55.975.166	86.367.248	43.090.305
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5.671.200	3.717.175	1.724.000	3.442.830	4.720.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>596.749.437</b>	<b>688.479.409</b>	<b>784.773.769</b>	<b>930.895.765</b>	<b>1.135.996.245</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	404.853.803	509.620.090	560.902.120	662.045.111	694.104.942
1.1 Belanja Pegawai	354.484.440	411.795.654	445.509.408	531.937.565	576.004.084
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	165.000	1.165.000	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	8.014.350	20.350.419	35.076.399	41.927.000	685.000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	767.900	5.036.450	4.473.000	1.300.000	0
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.828.053	1.972.462	2.420.830	3.300.444	3.439.215
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	38.340.310	68.300.105	71.922.483	82.680.102	112.976.643
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.253.750	1.000.000	1.500.000	900.000	1.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	191.895.634	178.859.319	223.871.649	268.850.654	441.891.303
2.1 Belanja Pegawai	18.608.572	21.339.245	21.072.750	48.455.058	61.418.633
2.2 Belanja Barang dan Jasa	89.481.279	102.237.917	133.919.731	124.704.281	153.360.232
2.3 Belanja Modal	83.805.783	55.282.157	68.879.168	95.691.315	227.112.438
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>29.500.000</b>	<b>35.281.928</b>	<b>63.138.555</b>	<b>2.741.893</b>	<b>105.316.000</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.000.000	35.281.928	63.638.555	104.866.792	110.000.000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.000.000	35.281.928	63.638.555	104.866.792	110.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	500.000	0	500.000	0	4.684.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000	0	500.000	0	4.684.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>837.759.326</b>	<b>957.295.413</b>	<b>1.116.371.215</b>	<b>1.226.081.077</b>	<b>1.766.956.768</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	124.305.930	140.991.228	160.008.363	205.273.392	233.609.397
1.1 Hasil Pajak Daerah	77.627.801	86.292.000	99.758.423	125.839.116	134.299.663
1.2 Hasil Retribusi Daerah	7.247.980	9.050.205	10.191.800	10.236.014	12.098.415
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.097.108	12.250.300	15.418.140	14.633.230	12.333.527
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.333.041	33.398.723	34.640.000	54.565.032	74.877.792
2 DANA PERIMBANGAN	576.383.961	642.839.138	701.929.283	50.855.032	1.258.489.522
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.590.371	26.647.713	26.661.842	23.024.006	23.084.489
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	503.028.930	563.981.785	614.793.461	633.241.287	732.963.859
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	46.764.660	51.209.640	60.473.980	69.845.030	502.441.174
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	137.069.435	174.465.047	254.433.569	294.697.362	274.857.849
3.1 Pendapatan Hibah	420.000	420.000	420.000	0	64.381.193
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.313.093	60.209.968	63.995.987	91.401.629	109.637.535
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	54.485.573	79.110.834	116.152.134	166.686.741	49.301.984
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	26.840.769	34.724.245	73.865.448	36.608.992	51.537.137
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.000	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>984.323.383</b>	<b>1.049.658.680</b>	<b>1.155.747.491</b>	<b>1.269.495.869</b>	<b>1.811.460.388</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	603.562.760	681.484.820	765.199.902	895.592.830	1.194.242.956
1.1 Belanja Pegawai	522.732.626	581.596.339	658.216.931	721.799.958	1.011.539.063
1.2 Belanja Bunga	1.165.000	8.165.000	8.165.000	8.165.000	5.000.000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	29.627.784	27.187.500	30.436.007	42.556.326	2.980.500
1.5 Belanja Bantuan Sosial	195.000	2.955.000	3.000.000	3.242.000	955.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.386.770	13.154.302	15.071.742	13.607.513	14.639.808
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	35.755.580	45.226.679	47.310.222	103.222.033	157.128.585
1.8 Belanja Tidak Terduga	2.700.000	3.200.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	380.760.623	368.173.860	390.547.589	373.903.039	617.217.432
2.1 Belanja Pegawai	14.377.493	19.921.986	19.576.789	20.644.145	29.605.535
2.2 Belanja Barang dan Jasa	138.501.985	173.168.855	211.036.689	236.147.176	344.268.642
2.3 Belanja Modal	227.881.145	175.083.019	159.934.111	117.111.718	243.343.256
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>146.564.057</b>	<b>92.363.267</b>	<b>39.376.276</b>	<b>16.680.763</b>	<b>44.503.620</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	151.525.018	111.863.267	66.389.276	72.795.932	73.003.620
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	48.167.685	46.045.844	66.389.276	72.795.932	73.003.620
1.2 Pencairan Dana Cadangan	5.357.333	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	98.000.000	65.817.423	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.960.961	19.500.000	27.013.000	29.381.140	28.500.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	312.979	0	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.847.108	5.000.000	2.000.000	4.368.140	4.500.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	800.874	14.500.000	25.013.000	25.013.000	24.000.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.118.371.415</b>	<b>1.286.766.285</b>	<b>1.468.256.803</b>	<b>1.668.718.324</b>	<b>2.082.621.121</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	111.569.018	128.000.000	176.133.800	221.903.000	273.607.818
1.1 Hasil Pajak Daerah	36.127.887	40.958.425	68.972.337	85.782.281	115.956.038
1.2 Hasil Retribusi Daerah	8.218.192	12.131.756	13.106.070	13.018.096	18.359.171
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.156.368	9.734.199	12.730.798	11.961.901	13.329.765
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.066.571	65.175.620	81.324.595	111.140.722	125.962.844
2 DANA PERIMBANGAN	794.743.794	906.226.901	957.813.099	99.931.800	1.364.898.869
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.456.898	42.495.661	38.382.641	33.629.377	32.090.906
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	687.697.696	796.419.220	854.532.248	868.511.959	982.698.080
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	62.589.200	67.312.020	64.898.210	74.876.950	350.109.883
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	212.058.603	252.539.384	334.309.904	469.797.038	444.114.434
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.691.634	120.747.557	127.877.285	172.687.624	198.737.341
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	87.624.978	126.009.808	186.575.619	281.331.752	210.322.093
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.989.992	5.782.018	19.857.000	15.777.662	35.055.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	751.999	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.170.579.218</b>	<b>1.401.593.792</b>	<b>1.605.091.803</b>	<b>1.785.202.066</b>	<b>2.156.911.480</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	836.491.898	917.199.812	986.233.738	1.176.323.664	1.281.299.177
1.1 Belanja Pegawai	715.422.526	806.791.653	867.579.713	982.146.961	996.202.896
1.2 Belanja Bunga	200.000	60.000	60.000	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	58.779.700	28.710.000	28.000.000	35.329.407	39.889.310
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2.169.822	4.915.000	4.515.000	4.765.000	150.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.000.000	3.930.093	8.207.841	9.880.038	13.431.521
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	54.235.500	71.378.445	71.844.402	138.942.445	230.027.309
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.684.350	1.414.711	6.026.782	5.259.813	1.598.141
2 BELANJA LANGSUNG	334.087.320	484.393.980	618.858.065	608.878.402	875.612.303
2.1 Belanja Pegawai	18.572.949	28.913.324	30.395.700	31.674.659	49.241.794
2.2 Belanja Barang dan Jasa	186.983.825	254.209.425	327.145.718	343.487.160	520.050.860
2.3 Belanja Modal	128.530.546	201.271.232	261.316.647	233.716.583	306.319.650
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>52.207.803</b>	<b>114.827.507</b>	<b>136.835.000</b>	<b>17.209.024</b>	<b>74.290.359</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.157.803	120.377.507	145.000.000	127.133.742	84.590.359
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.157.803	120.377.507	145.000.000	127.133.742	84.590.359
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.950.000	5.550.000	8.165.000	10.650.000	10.300.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	10.300.000
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.600.000	5.250.000	7.865.000	10.650.000	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	350.000	300.000	300.000	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.149.331.960</b>	<b>1.278.760.313</b>	<b>1.467.521.163</b>	<b>1.725.426.452</b>	<b>2.014.147.069</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	352.511.291	513.061.591	610.266.592	681.259.855	715.452.848
1.1 Hasil Pajak Daerah	267.800.000	403.000.000	468.840.592	523.978.712	533.177.648
1.2 Hasil Retribusi Daerah	23.533.750	38.079.489	44.804.344	44.029.560	46.231.038
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.455.541	15.325.102	24.815.606	24.531.583	25.758.162
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.722.000	56.657.000	71.806.050	88.720.000	110.286.000
2 DANA PERIMBANGAN	614.150.405	656.582.041	715.256.133	76.600.000	1.087.392.416
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	92.994.609	64.982.449	74.651.447	71.101.582	85.655.993
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	512.666.446	580.807.702	615.961.906	625.978.507	661.794.756
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	8.489.350	10.791.890	24.642.780	5.226.190	339.941.667
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.670.264	109.116.680	141.998.438	341.860.318	211.301.805
3.1 Pendapatan Hibah	4.688.512	1.688.512	1.636.248	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	92.575.449	100.529.183	106.343.905	158.753.502	184.188.800
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83.956.353	0	22.763.285	182.856.816	26.863.005
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.449.950	6.898.985	11.255.000	250.000	250.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.218.291.878</b>	<b>1.353.987.823</b>	<b>1.552.521.163</b>	<b>1.760.606.869</b>	<b>2.126.032.569</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	672.616.325	661.132.515	750.941.457	1.016.504.141	1.241.083.854
1.1 Belanja Pegawai	589.379.525	579.045.203	626.718.909	830.056.405	991.172.729
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	16.961.682	26.665.000	33.616.568	72.361.689	34.097.575
1.5 Belanja Bantuan Sosial	0	162.500	325.000	2.672.913	2.672.913
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.187.618	19.187.618	21.544.000	29.044.000	57.940.869
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	45.037.500	35.072.194	66.846.980	79.369.134	152.199.768
1.8 Belanja Tidak Terduga	2.050.000	1.000.000	1.890.000	3.000.000	3.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	545.675.553	692.855.308	801.579.706	744.102.728	884.948.715
2.1 Belanja Pegawai	49.495.005	54.688.927	18.637.751	17.674.915	21.132.491
2.2 Belanja Barang dan Jasa	278.492.925	388.529.059	511.682.959	516.563.756	577.298.327
2.3 Belanja Modal	217.687.623	249.637.322	271.258.996	209.864.057	286.517.897
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>68.959.918</b>	<b>75.227.513</b>	<b>85.000.000</b>	<b>11.861.634</b>	<b>111.885.500</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	71.930.674	89.979.713	100.000.000	100.000.000	122.385.500
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	71.930.674	89.979.713	100.000.000	100.000.000	122.385.500
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.970.756	14.752.203	15.000.000	64.819.583	10.500.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.970.756	14.752.203	15.000.000	64.819.583	10.500.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>651.398.304</b>	<b>745.334.983</b>	<b>823.352.410</b>	<b>903.622.270</b>	<b>1.090.625.089</b>
1 <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>46.470.110</b>	<b>68.485.482</b>	<b>89.349.645</b>	<b>98.032.646</b>	<b>114.533.487</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	11.043.396	22.069.530	30.111.096	32.861.322	33.964.149
1.2 Hasil Retribusi Daerah	6.750.578	7.905.526	8.836.895	8.925.326	10.241.922
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.853.011	3.937.071	4.940.559	4.912.892	6.183.844
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.823.127	34.573.855	45.461.095	51.333.106	64.143.572
2 <b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>464.324.549</b>	<b>517.834.703</b>	<b>546.799.187</b>	<b>577.461.799</b>	<b>707.078.035</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.391.860	21.511.707	18.427.053	15.688.309	20.162.001
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	396.762.339	450.919.726	484.825.804	486.895.030	562.525.134
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	40.170.350	45.403.270	43.546.330	74.878.460	124.390.900
3 <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>140.603.644</b>	<b>159.014.797</b>	<b>187.203.579</b>	<b>228.127.824</b>	<b>269.013.568</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	58.787.556
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	79.964.813	86.699.593	114.153.616	131.798.589	101.663.393
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.680.144	70.517.727	70.899.963	83.094.188	53.112.041
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.958.688	1.797.477	2.150.000	825.000	27.587.098
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	12.410.047	27.863.479
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>664.723.060</b>	<b>718.538.444</b>	<b>786.285.299</b>	<b>885.833.184</b>	<b>1.128.489.214</b>
1 <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>394.837.894</b>	<b>416.035.004</b>	<b>441.901.508</b>	<b>506.733.928</b>	<b>520.560.153</b>
1.1 Belanja Pegawai	335.950.650	353.148.286	376.791.591	397.650.714	410.511.394
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	23.593.700	14.529.650	16.157.500	39.120.670	10.823.752
1.5 Belanja Bantuan Sosial	60.000	3.109.038	2.984.519	225.333	455.598
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.888.319	8.528.288	8.558.125	13.099.594	15.736.498
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27.259.198	36.700.121	37.409.773	56.636.018	83.032.913
1.8 Belanja Tidak Terduga	86.028	19.622	0	1.599	0
2 <b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>269.885.166</b>	<b>302.503.439</b>	<b>344.383.791</b>	<b>378.899.256</b>	<b>607.929.061</b>
2.1 Belanja Pegawai	28.006.612	33.198.532	26.392.136	31.514.727	53.011.013
2.2 Belanja Barang dan Jasa	107.264.780	126.741.441	156.133.946	161.433.363	230.285.169
2.3 Belanja Modal	134.613.774	142.563.466	161.857.709	185.951.166	324.632.880
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>74.388.745</b>	<b>58.067.447</b>	<b>82.265.655</b>	<b>115.887.900</b>	<b>115.089.511</b>
1 <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>82.588.745</b>	<b>66.467.447</b>	<b>90.665.655</b>	<b>124.437.900</b>	<b>132.008.467</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	77.283.939	61.063.989	84.863.986	119.332.767	132.008.467
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	601.669	105.133	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	5.304.805	5.403.458	5.200.000	5.000.000	0
2 <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>16.918.956</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.550.000	16.918.956
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.000.000	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>61.063.989</b>	<b>84.863.986</b>	<b>119.332.767</b>	<b>133.876.986</b>	<b>77.225.386</b>



Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.056.319.329</b>	<b>1.253.026.819</b>	<b>1.367.078.412</b>	<b>1.615.933.308</b>	<b>1.794.601.450</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>183.295.007</b>	<b>255.418.219</b>	<b>273.426.482</b>	<b>300.799.020</b>	<b>318.083.799</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	50.214.003	98.701.047	95.414.689	105.792.993	105.186.643
1.2 Hasil Retribusi Daerah	28.540.910	40.393.769	42.557.737	47.030.646	22.397.630
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.925.320	8.046.089	7.197.219	7.322.114	8.741.999
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	98.614.773	108.277.313	128.256.837	140.653.267	181.757.527
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>656.500.460</b>	<b>734.577.587</b>	<b>799.770.748</b>	<b>815.846.445</b>	<b>1.102.265.093</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.787.676	22.499.522	21.634.728	17.441.963	23.775.525
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	574.346.244	663.156.595	719.621.530	722.004.642	826.283.780
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	47.366.540	48.921.470	58.514.490	76.399.840	252.205.788
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>216.523.861</b>	<b>263.031.013</b>	<b>293.881.182</b>	<b>499.287.843</b>	<b>374.252.558</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	93.214.569	101.080.965
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	92.041.973	108.713.962	129.514.006	157.674.595	113.082.190
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	118.390.170	146.900.369	159.747.176	247.995.679	88.183.813
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.091.718	7.416.682	4.620.000	403.000	22.969.446
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	48.936.144
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.065.536.683</b>	<b>1.198.702.307</b>	<b>1.333.200.899</b>	<b>1.586.227.841</b>	<b>1.873.464.986</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>728.164.337</b>	<b>809.282.889</b>	<b>904.158.292</b>	<b>1.050.345.518</b>	<b>1.172.428.439</b>
1.1 Belanja Pegawai	633.357.315	691.380.832	765.788.650	824.144.117	910.740.328
1.2 Belanja Bunga	72.318	62.830	53.534	44.197	31.394
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	29.847.290	34.772.500	42.877.500	45.344.113	37.395.400
1.5 Belanja Bantuan Sosial	0	6.000.000	7.938.000	3.204.500	2.926.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.327.289	6.099.798	6.689.000	12.978.454	14.417.336
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	59.370.869	67.735.168	80.174.694	164.630.137	206.136.049
1.8 Belanja Tidak Terduga	2.189.256	3.231.761	636.914	0	781.932
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>337.372.346</b>	<b>389.419.418</b>	<b>429.042.607</b>	<b>535.882.323</b>	<b>701.036.547</b>
2.1 Belanja Pegawai	13.332.878	13.194.053	13.824.716	33.905.165	27.146.895
2.2 Belanja Barang dan Jasa	185.316.398	248.038.980	278.872.986	389.007.715	416.829.978
2.3 Belanja Modal	138.723.070	128.186.385	136.344.905	112.969.443	257.059.674
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>52.586.851</b>	<b>38.204.187</b>	<b>87.466.515</b>	<b>117.690.293</b>	<b>146.569.365</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>53.964.886</b>	<b>43.482.222</b>	<b>92.899.550</b>	<b>121.968.328</b>	<b>148.047.400</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.904.766	43.369.497	92.528.624	121.329.374	147.395.730
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	370.926	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	60.120	112.725	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	638.954	651.670
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.378.035</b>	<b>5.278.035</b>	<b>5.433.035</b>	<b>4.278.035</b>	<b>1.478.035</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	1.300.000	0	0	200.000	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	5.200.000	5.355.000	4.000.000	1.200.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	78.035	78.035	78.035	78.035	78.035
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	200.000
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>43.369.497</b>	<b>92.528.698</b>	<b>121.344.102</b>	<b>147.395.760</b>	<b>67.705.829</b>



Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.618.695.201</b>	<b>2.954.662.971</b>	<b>3.459.986.016</b>	<b>3.735.129.565</b>	<b>4.328.245.676</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.870.187.279</b>	<b>2.279.113.502</b>	<b>2.722.625.563</b>	<b>3.001.464.263</b>	<b>3.563.589.483</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	1.685.560.837	2.010.554.251	2.339.332.865	2.598.718.130	2.968.152.918
1.2 Hasil Retribusi Daerah	68.946.271	90.457.626	116.502.661	96.040.159	118.514.066
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41.756.733	71.350.740	125.339.003	142.995.660	186.013.183
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73.923.438	106.750.885	141.451.034	163.710.314	290.909.316
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>515.654.159</b>	<b>429.797.446</b>	<b>381.713.596</b>	<b>332.251.562</b>	<b>543.323.025</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	160.747.933	56.611.263	56.346.741	44.947.526	78.823.886
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	353.067.906	372.625.383	324.815.695	286.763.106	336.243.365
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	1.838.320	560.800	551.160	540.930	128.255.774
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>232.853.762</b>	<b>245.752.022</b>	<b>355.646.857</b>	<b>401.413.740</b>	<b>221.333.168</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	70.344.473	75.091.364	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	122.552.871	102.342.371	130.253.478	162.799.634	150.237.741
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	76.432.769	113.491.184	131.532.528	163.317.741	70.890.427
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.583.570	960.285	205.000	205.000	205.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.284.553	28.958.182	23.311.379	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>2.334.080.297</b>	<b>2.755.459.722</b>	<b>3.276.164.110</b>	<b>3.446.634.315</b>	<b>4.162.119.988</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.268.529.843</b>	<b>1.488.224.177</b>	<b>1.654.384.787</b>	<b>1.909.366.328</b>	<b>2.100.194.081</b>
1.1 Belanja Pegawai	767.437.703	881.464.639	982.021.269	1.035.507.051	1.094.429.122
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	910.000	2.090.000	3.837.400	5.393.600	4.378.338
1.4 Belanja Hibah	444.320.461	95.313.469	93.604.910	144.802.581	186.856.128
1.5 Belanja Bantuan Sosial	48.119.962	52.141.750	33.549.093	26.839.800	43.116.500
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	191.156.530	212.227.730	272.387.605	332.221.197	385.408.982
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	216.289.003	234.132.969	268.781.366	364.602.099	385.529.239
1.8 Belanja Tidak Terduga	296.183	10.853.620	203.145	0	475.772
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.065.550.455</b>	<b>1.267.235.545</b>	<b>1.621.779.323</b>	<b>1.537.267.986</b>	<b>2.061.925.907</b>
2.1 Belanja Pegawai	63.448.807	75.694.058	63.427.200	59.742.497	52.697.107
2.2 Belanja Barang dan Jasa	374.395.948	424.829.297	609.282.785	554.753.161	814.112.678
2.3 Belanja Modal	627.705.700	766.712.190	949.069.337	922.772.328	1.195.116.122
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>614.687.764</b>	<b>688.998.737</b>	<b>739.884.087</b>	<b>625.326.073</b>	<b>910.007.075</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>759.887.764</b>	<b>902.998.737</b>	<b>893.884.087</b>	<b>925.326.073</b>	<b>914.810.545</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	757.401.952	901.461.570	888.147.920	923.705.992	913.860.040
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	455.618	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	2.485.813	1.537.167	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	5.736.167	1.164.463	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	950.505
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>145.200.000</b>	<b>214.000.000</b>	<b>154.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>4.803.470</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	145.200.000	214.000.000	154.000.000	300.000.000	4.803.470
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>899.302.668</b>	<b>888.201.986</b>	<b>923.705.992</b>	<b>913.821.324</b>	<b>1.076.132.762</b>



Tabel 13. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.066.239.511</b>	<b>1.248.415.648</b>	<b>1.400.913.781</b>	<b>1.527.797.536</b>	<b>1.682.778.978</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>261.222.178</b>	<b>319.612.005</b>	<b>424.472.546</b>	<b>457.321.018</b>	<b>529.864.618</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	159.636.602	204.436.633	276.603.966	307.668.563	372.927.608
1.2 Hasil Retribusi Daerah	30.400.835	31.816.584	35.472.015	40.055.120	40.756.608
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.340.708	7.247.310	9.685.085	7.530.611	8.248.444
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.844.032	76.111.478	102.711.480	102.066.724	107.931.958
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>604.397.691</b>	<b>690.817.394</b>	<b>694.464.178</b>	<b>673.568.860</b>	<b>905.918.780</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.584.490	36.365.388	22.906.730	18.983.901	27.323.005
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	532.883.001	609.293.266	626.674.608	641.915.439	705.975.450
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	35.930.200	45.158.740	44.882.840	12.669.520	172.620.325
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>200.619.642</b>	<b>237.986.249</b>	<b>281.977.057</b>	<b>396.907.658</b>	<b>246.995.580</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	1.254.000	71.207.425	53.599.850
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	78.603.207	74.464.120	102.717.775	121.995.559	110.404.608
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	110.035.955	161.704.394	177.774.328	198.962.709	82.239.008
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.980.481	1.817.735	205.000	4.741.965	560.823
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	25.954	0	191.292
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.006.500.072</b>	<b>1.192.027.629</b>	<b>1.354.851.666</b>	<b>1.504.436.669</b>	<b>1.786.411.745</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>697.912.390</b>	<b>770.124.483</b>	<b>862.790.093</b>	<b>936.408.399</b>	<b>1.074.627.473</b>
1.1 Belanja Pegawai	593.821.653	642.045.061	729.415.554	766.423.103	789.248.493
1.2 Belanja Bunga	20.833	89	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	2.831.540	2.848.695	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	42.778.954	41.656.367	29.888.691	24.717.940	50.029.224
1.5 Belanja Bantuan Sosial	597.000	15.107.844	10.137.470	5.172.084	2.018.306
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24.171.698	27.839.464	31.767.119	31.719.899	47.086.496
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	33.545.180	40.625.763	60.969.556	107.944.073	185.620.386
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	1.200	611.702	431.300	624.567
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>308.587.682</b>	<b>421.903.146</b>	<b>492.061.573</b>	<b>568.028.270</b>	<b>711.784.273</b>
2.1 Belanja Pegawai	29.802.387	31.294.706	34.272.471	48.670.764	54.456.292
2.2 Belanja Barang dan Jasa	158.157.838	205.284.944	256.608.015	295.175.011	347.410.368
2.3 Belanja Modal	120.627.457	185.323.496	201.181.086	224.182.495	309.917.612
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>89.010.275</b>	<b>143.249.714</b>	<b>191.137.733</b>	<b>227.478.093</b>	<b>235.479.596</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>92.350.132</b>	<b>148.749.714</b>	<b>199.637.733</b>	<b>239.737.667</b>	<b>250.838.960</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	92.350.132	148.749.714	199.637.733	239.737.667	250.838.960
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3.339.857</b>	<b>5.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>12.259.574</b>	<b>15.359.364</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000	5.500.000	8.500.000	12.259.574	15.050.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	339.857	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	309.364
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>148.749.714</b>	<b>199.637.732</b>	<b>273.199.846</b>	<b>250.838.960</b>	<b>131.846.829</b>





Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>590.231.294</b>	<b>711.405.235</b>	<b>827.028.807</b>	<b>907.139.632</b>	<b>1.062.218.238</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>48.561.525</b>	<b>67.401.910</b>	<b>98.837.766</b>	<b>120.035.996</b>	<b>134.142.054</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	3.480.972	13.234.733	19.654.037	34.668.113	43.744.803
1.2 Hasil Retribusi Daerah	0	10.597.832	22.441.798	21.776.641	21.874.454
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.962.299	8.595.168	8.093.536	7.164.793	7.778.148
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.118.525	34.974.178	48.648.395	56.426.449	60.744.649
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>432.131.856</b>	<b>496.925.310</b>	<b>532.950.783</b>	<b>542.012.560</b>	<b>699.514.521</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.970.390	19.967.531	16.255.597	14.233.393	19.439.467
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	387.340.103	444.174.019	474.427.796	484.541.151	539.855.201
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	24.821.363	32.783.760	42.267.390	43.238.016	140.219.853
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>109.537.913</b>	<b>147.078.015</b>	<b>195.240.258</b>	<b>245.091.076</b>	<b>228.561.663</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	1.890.000	23.770.800	24.629.750
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	59.623.497	75.819.536	96.050.343	115.063.231	117.416.482
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	43.179.357	70.411.164	89.963.515	105.854.045	34.259.137
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.735.059	847.315	7.336.400	403.000	17.997.157
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	34.259.137
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>598.898.361</b>	<b>665.548.503</b>	<b>783.124.988</b>	<b>890.952.557</b>	<b>971.294.294</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>406.736.633</b>	<b>470.137.179</b>	<b>515.195.550</b>	<b>572.974.721</b>	<b>585.085.208</b>
1.1 Belanja Pegawai	364.767.535	392.033.389	432.626.792	456.198.002	477.641.196
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	20.336.674	51.765.579	51.821.910	34.722.283	2.649.800
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4.128.700	604.457	2.407.500	1.511.500	1.926.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	793.983	207.220	1.219.296	8.354.294	6.650.221
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	16.395.757	25.507.616	27.007.417	72.188.642	96.110.002
1.8 Belanja Tidak Terduga	313.983	18.918	112.636	0	107.990
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>192.161.730</b>	<b>195.411.324</b>	<b>267.929.438</b>	<b>317.977.836</b>	<b>386.209.085</b>
2.1 Belanja Pegawai	10.620.685	17.076.559	11.255.085	16.865.673	20.600.125
2.2 Belanja Barang dan Jasa	100.317.861	114.240.793	156.857.982	181.773.764	221.501.353
2.3 Belanja Modal	81.223.182	64.093.972	99.816.371	119.338.399	144.107.607
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>64.623.353</b>	<b>52.846.285</b>	<b>96.103.817</b>	<b>138.677.227</b>	<b>149.867.330</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>66.723.353</b>	<b>56.846.285</b>	<b>98.853.817</b>	<b>142.277.227</b>	<b>154.861.330</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.658.353	55.956.285	98.703.817	141.802.227	154.861.330
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	65.000.000	0	150.000	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	890.000	0	475.000	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.994.000</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	3.600.000	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.100.000	4.000.000	2.750.000	0	4.994.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>55.958.285</b>	<b>98.703.017</b>	<b>140.006.836</b>	<b>154.864.302</b>	<b>240.791.274</b>



Tabel 15. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>622.718.265</b>	<b>702.229.030</b>	<b>793.647.679</b>	<b>873.469.027</b>	<b>1.040.303.804</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>40.751.050</b>	<b>55.986.570</b>	<b>76.141.461</b>	<b>87.731.141</b>	<b>104.829.402</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	6.107.125	7.679.636	11.802.145	12.557.945	16.048.826
1.2 Hasil Retribusi Daerah	10.101.009	11.302.691	14.995.769	18.566.238	25.553.072
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.563.279	3.425.035	3.550.338	4.008.691	4.815.356
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.979.637	33.579.207	45.793.210	52.598.267	58.412.148
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>459.413.969</b>	<b>513.012.768</b>	<b>546.402.982</b>	<b>569.345.606</b>	<b>752.414.034</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.211.806	23.512.514	16.826.057	14.512.035	19.060.280
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	396.942.913	450.812.694	486.381.005	499.734.801	568.278.943
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	38.259.250	38.687.560	43.195.920	55.098.770	165.074.811
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>122.553.247</b>	<b>133.229.692</b>	<b>171.103.236</b>	<b>216.392.280</b>	<b>183.060.368</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	10.215.971
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	72.005.747	76.161.491	97.884.223	117.658.813	125.465.705
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.289.956	55.975.166	71.999.013	96.577.827	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.257.543	1.043.035	1.220.000	2.155.640	4.288.387
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	50.000	0	0	43.090.305
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>592.232.375</b>	<b>652.343.659</b>	<b>762.376.999</b>	<b>899.776.029</b>	<b>1.089.450.148</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>395.736.957</b>	<b>475.739.271</b>	<b>556.735.255</b>	<b>616.282.161</b>	<b>646.035.803</b>
1.1 Belanja Pegawai	345.288.250	371.523.272	417.521.985	475.644.606	518.950.035
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	1.415.000	165.000	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	6.479.550	32.678.300	61.031.213	45.155.081	8.239.307
1.5 Belanja Bantuan Sosial	0	2.264.325	3.255.000	1.080.000	2.214.280
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.787.335	1.972.462	2.420.830	3.335.672	3.709.836
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	40.555.934	67.135.912	71.375.085	91.066.802	112.855.906
1.8 Belanja Tidak Terduga	210.887	0	1.131.142	0	66.440
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>196.495.419</b>	<b>176.604.387</b>	<b>205.641.743</b>	<b>283.493.868</b>	<b>443.414.345</b>
2.1 Belanja Pegawai	19.555.794	20.116.995	19.937.561	46.406.486	61.246.105
2.2 Belanja Barang dan Jasa	94.598.698	93.724.429	115.486.913	126.373.661	131.942.216
2.3 Belanja Modal	82.340.927	62.762.964	70.217.269	110.713.721	250.226.024
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>23.647.021</b>	<b>-3.694.086</b>	<b>96.836.097</b>	<b>127.941.507</b>	<b>86.555.239</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>24.780.384</b>	<b>675.000</b>	<b>101.336.097</b>	<b>127.941.507</b>	<b>103.455.210</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	24.780.384	0	100.203.467	127.941.507	103.455.210
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	675.000	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	1.132.630	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.133.363</b>	<b>4.369.086</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>16.899.971</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	4.500.000	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000	4.000.000	0	0	16.899.971
2.3 Pembayaran Pokok Utang	633.363	369.086	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>54.132.911</b>	<b>46.191.286</b>	<b>128.106.777</b>	<b>101.634.505</b>	<b>37.408.895</b>



Tabel 16. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>907.014.578</b>	<b>1.041.577.611</b>	<b>1.248.392.023</b>	<b>1.367.577.564</b>	<b>1.462.024.349</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>144.019.629</b>	<b>168.652.790</b>	<b>239.425.005</b>	<b>243.125.914</b>	<b>232.644.013</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	92.776.781	103.841.036	138.541.746	139.626.191	117.782.188
1.2 Hasil Retribusi Daerah	10.977.702	11.991.692	13.022.203	14.255.154	15.984.975
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.470.823	15.235.409	17.064.083	13.535.055	13.592.314
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.794.323	37.584.653	70.796.973	75.709.514	85.284.536
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>578.456.232</b>	<b>644.192.869</b>	<b>695.408.544</b>	<b>706.426.130</b>	<b>937.628.022</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.662.642	29.001.444	20.141.103	17.307.499	22.447.406
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	503.028.930	563.981.785	614.793.461	633.241.287	732.963.859
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	46.764.660	51.209.640	60.473.980	55.877.344	182.216.757
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>184.538.717</b>	<b>228.731.952</b>	<b>313.558.474</b>	<b>418.025.520</b>	<b>291.752.314</b>
3.1 Pendapatan Hibah	429.804	425.450	3.509.238	79.127.259	73.937.390
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.109.846	66.786.104	95.553.641	105.387.045	102.832.588
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	80.380.941	116.152.134	142.071.021	178.178.534	49.301.984
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38.546.911	45.360.033	72.414.169	55.317.714	65.670.951
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	71.215	8.231	10.405	14.968	9.401
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>942.886.355</b>	<b>1.078.485.761</b>	<b>1.164.666.358</b>	<b>1.351.846.275</b>	<b>1.450.662.759</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>599.322.204</b>	<b>688.108.423</b>	<b>761.203.217</b>	<b>889.847.572</b>	<b>929.460.208</b>
1.1 Belanja Pegawai	514.003.615	576.905.293	643.596.813	703.046.385	748.260.250
1.2 Belanja Bunga	2.225.028	3.421.036	6.262.865	4.458.177	2.580.813
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	34.230.533	41.429.597	32.191.765	41.061.315	5.882.089
1.5 Belanja Bantuan Sosial	252.000	2.489.140	2.418.500	675.828	901.010
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.745.818	16.715.617	19.805.558	16.286.253	13.730.310
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	32.707.087	44.047.141	56.927.716	123.735.350	158.105.736
1.8 Belanja Tidak Terduga	2.158.123	3.100.599	0	584.264	0
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>343.564.151</b>	<b>390.377.338</b>	<b>403.463.141</b>	<b>461.998.703</b>	<b>521.202.550</b>
2.1 Belanja Pegawai	14.801.229	18.845.308	16.731.571	27.540.823	30.270.433
2.2 Belanja Barang dan Jasa	157.131.972	190.794.382	209.173.812	256.033.241	300.494.138
2.3 Belanja Modal	171.630.950	180.737.648	177.557.758	178.424.639	190.437.979
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>116.459.534</b>	<b>138.305.125</b>	<b>71.668.610</b>	<b>127.129.691</b>	<b>114.446.431</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>120.763.210</b>	<b>147.340.373</b>	<b>101.416.983</b>	<b>155.856.074</b>	<b>142.694.804</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85.008.554	80.587.755	101.396.976	155.844.274	142.685.297
1.2 Pencairan Dana Cadangan	5.683.029	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	30.052.577	65.744.496	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	1.000.000	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	8.122	20.007	11.800	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	9.507
1.8 Lainnya	19.050	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>4.303.676</b>	<b>9.035.248</b>	<b>29.748.373</b>	<b>28.726.383</b>	<b>28.248.373</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	325.695	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.847.108	3.000.000	6.000.000	4.978.010	4.500.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	130.873	6.035.248	23.748.373	23.748.373	23.748.373
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>80.587.757</b>	<b>101.396.975</b>	<b>155.844.274</b>	<b>142.860.980</b>	<b>125.808.022</b>



Tabel 17. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.196.436.251</b>	<b>1.390.657.293</b>	<b>1.543.584.631</b>	<b>1.937.771.345</b>	<b>2.066.173.156</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>129.003.995</b>	<b>160.292.011</b>	<b>219.682.330</b>	<b>293.038.467</b>	<b>282.113.900</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	39.124.665	57.770.211	85.017.340	110.723.083	102.239.173
1.2 Hasil Retribusi Daerah	13.132.938	14.872.963	12.684.819	19.944.242	15.129.372
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.369.948	12.732.894	11.740.066	12.657.529	15.030.437
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	67.376.444	74.915.942	110.240.105	149.713.612	149.714.918
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>793.541.645</b>	<b>907.851.103</b>	<b>947.573.267</b>	<b>983.333.688</b>	<b>1.305.606.678</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	43.254.749	44.119.859	28.142.809	26.264.579	29.020.240
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	687.697.696	796.419.224	854.532.248	868.511.959	982.698.080
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	62.589.200	67.312.020	64.898.210	88.557.150	293.888.359
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>273.890.611</b>	<b>322.514.179</b>	<b>376.329.034</b>	<b>661.399.189</b>	<b>478.452.578</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	1.958.000	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	129.243.140	131.792.220	152.730.072	194.472.620	204.521.694
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	126.021.617	186.572.702	218.781.224	463.880.846	246.211.291
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.662.272	3.208.921	4.350.000	777.662	27.719.594
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	963.582	940.336	467.738	310.062	
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.123.510.074</b>	<b>1.413.380.933</b>	<b>1.558.960.849</b>	<b>1.865.996.555</b>	<b>2.200.205.551</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>830.820.428</b>	<b>944.333.238</b>	<b>1.024.745.249</b>	<b>1.121.044.573</b>	<b>1.274.346.716</b>
1.1 Belanja Pegawai	725.807.231	828.895.332	892.968.692	911.423.652	961.075.607
1.2 Belanja Bunga	86.681	52.092	21.751	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	47.719.209	36.751.500	28.672.500	34.159.908	81.808.234
1.5 Belanja Bantuan Sosial	1.512.000	4.618.811	4.115.000	4.500.000	0
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.999.969	3.930.092	8.207.840	9.880.038	15.347.391
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	51.154.442	69.352.870	83.733.566	160.890.165	214.928.828
1.8 Belanja Tidak Terduga	540.895	732.540	7.025.900	190.811	1.186.655
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>292.689.646</b>	<b>469.047.695</b>	<b>534.215.600</b>	<b>744.951.983</b>	<b>925.858.836</b>
2.1 Belanja Pegawai	19.591.457	30.365.373	29.705.058	54.131.113	56.958.806
2.2 Belanja Barang dan Jasa	193.664.351	252.785.605	320.882.679	464.500.743	523.752.143
2.3 Belanja Modal	79.433.838	185.896.717	183.627.864	226.320.127	345.147.887
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>73.018.042</b>	<b>134.355.572</b>	<b>108.688.273</b>	<b>91.254.055</b>	<b>162.504.812</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>75.819.786</b>	<b>145.944.219</b>	<b>111.631.932</b>	<b>93.312.055</b>	<b>162.604.812</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75.819.786	145.944.219	111.631.932	93.312.055	162.604.812
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.801.744</b>	<b>11.588.647</b>	<b>2.943.659</b>	<b>2.058.000</b>	<b>100.000</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000	11.315.946	2.700.000	2.058.000	100.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	301.744	272.701	243.659	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>145.944.219</b>	<b>111.631.932</b>	<b>93.312.055</b>	<b>163.028.844</b>	<b>28.472.417</b>



Tabel 18. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2012 - 2016 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.379.049.166</b>	<b>1.547.605.213</b>	<b>1.727.968.713</b>	<b>1.786.400.782</b>	<b>1.943.172.688</b>
1 <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>511.326.621</b>	<b>658.974.707</b>	<b>698.739.758</b>	<b>776.214.149</b>	<b>807.050.192</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	377.247.592	504.981.564	510.582.656	549.362.947	574.258.306
1.2 Hasil Retribusi Daerah	43.772.750	47.874.288	54.764.870	59.243.427	49.614.843
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.489.907	20.774.563	24.953.438	35.341.143	35.317.015
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71.816.372	85.344.292	108.438.795	132.266.631	147.860.028
2 <b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>655.349.185</b>	<b>661.103.049</b>	<b>693.247.533</b>	<b>681.684.333</b>	<b>878.197.109</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	134.193.389	72.201.429	69.892.793	50.479.636	81.693.715
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	512.666.446	580.807.702	615.961.906	625.978.507	661.794.756
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	8.489.350	8.093.918	7.392.834	5.226.190	134.708.638
3 <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>212.373.359</b>	<b>227.527.456</b>	<b>335.981.421</b>	<b>328.502.300</b>	<b>297.925.387</b>
3.1 Pendapatan Hibah	3.273.529	1.487.687	4.110.072	0	75.172.241
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.202.989	98.076.351	126.747.131	170.161.549	155.640.141
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.705.986	127.408.208	204.874.218	158.090.751	5.000.000
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.190.855	555.210	250.000	250.000	250.000
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	21.863.005
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.309.529.832</b>	<b>1.537.883.625</b>	<b>1.648.378.769</b>	<b>1.757.644.194</b>	<b>1.871.440.897</b>
1 <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>700.414.759</b>	<b>800.979.096</b>	<b>903.436.801</b>	<b>1.034.937.556</b>	<b>1.037.975.540</b>
1.1 Belanja Pegawai	607.158.432	672.344.600	755.951.062	769.525.774	789.551.175
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	27.591.357	58.971.605	46.883.417	87.123.626	53.396.265
1.5 Belanja Bantuan Sosial	0	218.635	162.500	2.723.500	3.460.600
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.187.618	21.544.000	29.044.000	29.044.000	57.917.772
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	46.181.343	38.776.154	71.371.172	146.440.463	128.894.438
1.8 Belanja Tidak Terduga	296.008	9.124.102	24.650	80.193	4.755.291
2 <b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>609.115.073</b>	<b>736.904.529</b>	<b>744.941.968</b>	<b>722.706.638</b>	<b>833.465.357</b>
2.1 Belanja Pegawai	50.005.352	50.422.357	14.758.938	17.551.898	17.911.640
2.2 Belanja Barang dan Jasa	352.966.007	432.473.820	496.141.308	512.835.219	557.885.790
2.3 Belanja Modal	206.143.714	254.008.353	234.041.722	192.319.521	257.667.927
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>188.277.555</b>	<b>212.643.283</b>	<b>202.344.527</b>	<b>214.951.519</b>	<b>168.233.832</b>
1 <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>205.911.244</b>	<b>257.805.713</b>	<b>222.364.871</b>	<b>281.934.472</b>	<b>246.301.607</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	205.836.244	257.796.739	222.364.871	281.913.662	243.708.107
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	75.000	8.974	0	0	2.593.500
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	20.810	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>17.633.689</b>	<b>45.162.430</b>	<b>20.020.344</b>	<b>66.982.953</b>	<b>78.067.775</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	17.633.689	45.054.173	19.999.306	66.982.953	78.067.775
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	108.256	21.037	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>257.796.889</b>	<b>222.364.872</b>	<b>281.934.472</b>	<b>243.708.107</b>	<b>239.965.623</b>



Tabel 19. Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2012-2016 (000Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>8.703.171.321</b>	<b>10.201.244.206</b>	<b>11.461.036.529</b>	<b>13.118.282.779</b>	<b>16.301.268.155</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.374.267.917	3.223.494.053	3.860.089.709	4.549.203.863	5.181.818.990
1.1 Hasil Pajak Daerah	1.777.314.867	2.503.361.648	2.942.159.031	3.422.480.277	3.832.813.519
1.2 Hasil Retribusi Daerah	146.443.868	213.582.870	255.437.829	267.093.902	313.996.735
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	89.407.759	103.478.429	162.188.518	198.244.290	226.103.844
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	361.101.423	403.071.108	500.304.331	661.385.394	808.904.891
2 DANA PERIMBANGAN	5.023.533.863	5.555.190.693	5.844.837.631	576.836.925	8.720.362.395
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	364.295.265	267.227.243	259.830.478	296.484.890	336.848.828
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	4.344.735.578	4.932.190.390	5.202.034.053	5.249.585.922	5.916.618.559
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	314.503.020	354.773.060	382.973.100	381.516.540	2.466.895.008
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.305.369.541	1.423.529.459	1.756.109.189	2.641.491.564	2.399.086.770
3.1 Pendapatan Hibah	5.108.512	2.108.512	2.056.248	0	195.690.947
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	656.644.316	733.498.902	777.025.922	1.091.618.295	1.330.155.378
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	549.428.150	587.744.986	823.283.792	1.465.441.715	695.024.829
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	70.142.011	71.248.877	130.431.848	79.320.484	150.352.137
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	24.046.552	28.958.182	23.311.379	5.111.070	27.863.479
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>9.255.009.021</b>	<b>11.020.034.194</b>	<b>12.448.638.938</b>	<b>13.936.249.170</b>	<b>17.389.385.449</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.936.235.348	6.652.345.883	7.325.033.676	8.824.140.413	10.124.942.503
1.1 Belanja Pegawai	4.931.191.044	5.395.586.792	5.897.710.220	6.824.110.017	7.626.377.916
1.2 Belanja Bunga	1.540.050	8.325.000	8.325.000	8.265.000	10.350.000
1.3 Belanja Subsidi	3.643.320	6.127.920	3.870.000	5.420.000	4.550.000
1.4 Belanja Hibah	231.319.853	274.918.632	318.140.301	517.643.029	370.275.326
1.5 Belanja Bantuan Sosial	50.625.905	86.506.692	67.984.107	62.666.043	57.292.411
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	205.766.515	276.242.047	337.940.887	401.513.984	506.651.646
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	497.937.805	592.823.537	671.811.187	987.161.313	1.530.029.504
1.8 Belanja Tidak Terduga	14.210.856	13.815.354	19.251.974	17.361.027	19.415.700
2 BELANJA LANGSUNG	3.318.773.673	4.367.688.311	5.123.605.262	5.112.108.757	7.264.442.946
2.1 Belanja Pegawai	243.018.028	298.217.409	248.135.093	299.007.129	370.512.310
2.2 Belanja Barang dan Jasa	1.508.410.731	1.979.102.679	2.556.767.548	2.620.405.931	3.503.635.718
2.3 Belanja Modal	1.567.344.914	2.090.368.225	2.318.702.621	2.192.695.697	3.390.294.918
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>552.537.284</b>	<b>818.789.988</b>	<b>988.296.112</b>	<b>215.632.438</b>	<b>1.189.780.327</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	722.846.001	998.019.191	1.063.972.551	957.931.118	1.455.805.503
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	612.973.751	924.799.768	1.057.959.657	952.293.224	1.298.715.940
1.2 Pencairan Dana Cadangan	5.357.333	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	98.349.792	65.817.423	0	0	150.000.000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	168.125	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	62.894	0	664.563
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	62.894	0
1.8 Lainnya	5.997.000	7.402.000	5.950.000	5.575.000	6.425.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	170.308.717	179.229.203	75.676.439	139.964.727	266.025.176
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	312.979	0	0	0	25.350.000
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	162.667.864	158.152.203	45.083.439	108.871.727	210.995.176
2.3 Pembayaran Pokok Utang	1.230.874	14.880.000	25.393.000	25.893.000	24.080.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	997.000	0	0	0
2.5 Lainnya	6.097.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.600.000
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>699.584</b>	<b>0</b>	<b>693.703</b>	<b>0</b>	<b>101.663.033</b>



Table 20. Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2012-2016 (000Rp)

Rincian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>10.088.101.899</b>	<b>11.594.914.803</b>	<b>13.191.952.471</b>	<b>14.654.841.029</b>	<b>16.470.143.429</b>
1 <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>46.470.110</b>	<b>68.485.482</b>	<b>4.842.700.555</b>	<b>5.377.762.614</b>	<b>6.086.850.948</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	11.043.396	22.069.530	3.507.060.540	3.891.979.288	4.334.304.614
1.2 Hasil Retribusi Daerah	6.750.578	7.905.026	321.278.766	325.836.952	320.066.942
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.853.011	3.937.071	121.563.327	235.468.489	285.720.740
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.823.127	34.573.855	801.797.923	924.477.885	1.146.758.652
2 <b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>464.324.549</b>	<b>517.834.703</b>	<b>5.838.330.818</b>	<b>5.881.930.984</b>	<b>7.831.945.296</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.391.860	21.511.707	270.573.611	219.858.842	321.745.524
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	396.762.339	450.919.726	5.202.034.053	5.249.585.922	5.916.618.568
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	40.170.350	45.403.270	365.723.154	412.486.220	1.593.581.204
3 <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>140.603.644</b>	<b>159.014.797</b>	<b>2.510.921.098</b>	<b>3.395.147.431</b>	<b>2.551.347.185</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	81.107.783	344.369.417	397.423.724
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	79.964.813	86.699.593	1.045.604.285	1.277.011.636	1.181.264.543
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.680.144	70.517.727	1.267.642.986	1.695.952.320	629.197.701
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	8.958.688	1.797.477	92.750.569	65.078.981	167.248.456
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	23.815.476	12.735.077	176.212.762
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>664.723.060</b>	<b>718.538.444</b>	<b>12.668.009.935</b>	<b>14.189.147.619</b>	<b>16.533.539.583</b>
1 <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>394.837.894</b>	<b>416.035.004</b>	<b>7.624.550.751</b>	<b>8.637.940.756</b>	<b>9.340.713.622</b>
1.1 Belanja Pegawai	335.950.650	353.148.286	5.996.682.408	6.339.563.403	6.700.407.599
1.2 Belanja Bunga	0	0	6.338.150	4.502.374	2.612.207
1.3 Belanja Subsidi	0	0	3.837.400	5.393.600	4.378.338
1.4 Belanja Hibah	23.593.700	14.529.650	403.129.406	496.207.517	437.080.198
1.5 Belanja Bantuan Sosial	60.000	3.109.038	66.967.581	45.932.545	57.018.294
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.888.319	8.528.288	380.099.373	456.919.401	560.004.843
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27.259.198	36.700.121	757.750.346	1.288.133.748	1.571.213.496
1.8 Belanja Tidak Terduga	86.028	19.622	9.746.088	1.288.168	7.998.647
2 <b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>269.885.166</b>	<b>302.503.439</b>	<b>5.043.459.184</b>	<b>5.551.206.863</b>	<b>7.192.825.962</b>
2.1 Belanja Pegawai	28.006.612	33.198.532	230.304.736	336.329.146	374.298.415
2.2 Belanja Barang dan Jasa	107.264.780	126.741.441	2.599.440.426	2.941.885.878	3.544.213.834
2.3 Belanja Modal	134.613.774	142.563.466	2.213.714.022	2.272.991.839	3.274.313.712
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>74.388.745</b>	<b>58.067.447</b>	<b>1.676.395.313</b>	<b>1.786.336.357</b>	<b>2.088.753.191</b>
1 <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>82.588.745</b>	<b>66.467.447</b>	<b>1.912.690.724</b>	<b>2.212.791.302</b>	<b>2.255.623.134</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	77.283.939	61.063.989	1.899.479.326	2.204.919.524	2.251.417.953
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	455.618	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	370.926	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	150.000	0	2.593.500
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	621.676	776.697	651.670
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	6.868.796	1.164.463	9.507
1.8 Lainnya	5.304.805	5.403.458	5.200.000	5.475.000	950.505
2 <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.200.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>236.295.410</b>	<b>426.454.945</b>	<b>166.869.944</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	4.500.000	3.800.000	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.200.000	3.200.000	202.504.306	393.828.537	142.534.172
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	24.091.104	23.826.408	23.826.408
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	5.000.000	5.200.000	5.200.000	5.000.000	509.364
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKEANAAN</b>	<b>61.063.989</b>	<b>84.863.986</b>	<b>2.236.787.121</b>	<b>2.252.029.767</b>	<b>2.025.357.036</b>



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar- 80226

Telp: (0361) 2381, Fax: 23162

Email: [bps5100@bps.go.id](mailto:bps5100@bps.go.id)

Website: <http://bali.bps.go.id>

ISSN 2477-7773



9 772477 777006